

**TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN DI KAWASAN
ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TINDAK
PIDANA EKONOMI**

Tesis

Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Andalas
Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh:

ALDISA MELISSA

NIM : 1720112002
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Dosen Pembimbing:

Pembimbing 1. Dr.Sukanda Husin, S.H.,L.LM .
Pembimbing 2. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum.



**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN AJARAN 2018/2019**

ABSTRAK

TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN DI KAWASAN ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA EKONOMI (Aldisa Melissa, 1720112002, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, 124 Halaman, 2019)

Indonesia memiliki laut Zona Ekonomi Eksklusif yang sangat luas sehingga memberikan manfaat bagi negara Indonesia dan negara lain untuk melakukan penangkapan ikan di kawasan tersebut. Penangkapan ikan tersebut harus mendapatkan izin sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Terjadinya tindak pidana penangkapan ikan di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merugikan perekonomian negara Indonesia. Penangkapan Ikan Tanpa Izin Di Kawasan Zona Ekonomi Eksklusif banyak terjadi di perairan ZEE Indonesia, sepanjang Januari-September 2017 ada 107 Kasus kapal ilegal yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna. Kerugian yang ditimbulkan dari penangkapan ikan tanpa izin di kawasan ZEE Indonesia adalah sebesar Rp.101.040.000.000. Kerugian ekonomi akibat sumber daya perikanan merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran dalam bidang perekonomian sehingga dapat dilihat dari segi tindak pidana bidang ekonomi. persoalan yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimanakah akibat hukum dari tindak pidana penangkapan ikan tanpa izin di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan bagaimana jika dilihat dari perspektif tindak pidana ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji bahan-bahan hukum peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang relevan, dengan hasil penelitian sebagai berikut 1) penangkapan ikan di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan teori yurisdiksi negara dapat diatur oleh negara Indonesia sebagai negara pantai yang berdaulat dan aturan tersebut secara tegas sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan kewajiban untuk memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) yang apabila dilanggar maka akan dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 93, 94, dan 94A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. 2) kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana penangkapan ikan tanpa izin di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif dapat merugikan perekonomian negara dalam bidang sumber daya perikanan, sehingga menurut teori pendekatan ekonomi dan defenisi tindak pidana ekonomi secara luas bahwa tindak pidana penangkapan ikan tanpa izin di kawasan ZEE Indonesia merupakan bagian dari tindak pidana ekonomi dalam arti luas.

Kata Kunci: Penangkapan Ikan, Zona Ekonomi Eksklusif, Tindak Pidana Ekonomi.